



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke-	:	9
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Senin, 15 September 2025
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	:	Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026
Ketua Rapat	:	Zulfikar Arse Sadikin, S.IP. M.Si./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	:	A. 24 (dua puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 42 (empat puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri PAN&RB C. Kepala BKN D. Kepala LAN E. Kepala ANRI F. Ketua Ombudsman RI G. Kepala OIKN H. Ketua KPU I. Ketua Bawaslu

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Menteri PANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, Ketua Ombudsman RI, Kepala

OIKN, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026, hari Senin, 15 September 2025, dibuka pukul 14.07 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, S.IP. M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Menteri PANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, Ketua Ombudsman RI, Kepala OIKN, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026, hari Senin, 15 September 2025, yaitu:

1. Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2026 sebesar **Rp392.980.127.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).**
2. Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2026 sebesar **Rp639.467.823.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).**
3. Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2026 sebesar **Rp293.349.382.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).**
4. Pagu Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2026 sebesar **Rp279.335.383.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).**
5. Pagu Anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2026 sebesar **Rp251.978.173.000,- (dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).**
6. Pagu Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2026 sebesar **Rp6.262.046.870.000,- (enam trilyun dua ratus enam**

puluhan dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

7. Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) tahun 2026 sebesar **Rp3.539.587.941.000,- (tiga trilyun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).**
8. Pagu Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) tahun 2026 sebesar **Rp2.472.934.469.000,- (dua trilyun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).**
9. Usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh :
 - a. Kementerian PANRB sebesar **Rp80.409.013.000,- (delapan puluh miliar empat ratus sembilan juta tiga belas ribu rupiah);**
 - b. BKN sebesar **Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);**
 - c. LAN sebesar **Rp55.600.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus juta rupiah);**
 - d. ANRI sebesar **Rp148.153.162.000,- (seratus empat puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);**
 - e. ORI sebesar **Rp199.348.354.000,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);**
 - f. OIKN sebesar **Rp14.920.000.000.000,- (empat belas trilyun sembilan ratus dua puluh miliar rupiah).**

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Menteri PANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, Ketua Ombudsman RI, Kepala OIKN, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026, hari Senin, 15 September 2025, yaitu:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2026 sebesar **Rp392.980.127.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (pagu definitif) Tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp253.460.127.000,-** (*dua ratus lima puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);
 - b. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN sebesar **Rp139.520.000.000,-** (*seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh juta rupiah*).
2. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2026 sebesar **Rp639.467.823.000,-** (*enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (pagu definitif) Tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp620.054.501.000,-** (*enam ratus dua puluh milyar lima puluh empat ratus lima ratus satu ribu rupiah*);
 - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar **Rp19.413.322.000,-** (*sembilan belas milyar empat ratus tiga belas ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2026 sebesar **Rp293.349.382.000,-** (*dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (pagu definitif) Tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp246.127.607.000,-** (*dua ratus empat puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah*);
 - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar **Rp47.221.775.000,-** (*empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu ratus tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
4. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2026 sebesar **Rp279.335.383.000,-** (*dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (pagu definitif) Tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp186.066.945.000,-** (*seratus delapan puluh enam milyar enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar **Rp93.268.438.000,-** (*sembilan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
5. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2026 sebesar **Rp251.978.173.000,-** (*dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (pagu definitif) Tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp214.955.632.000,-** (*dua ratus empat belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
 - b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar **Rp37.022.541.000,-** (*tiga puluh tujuh milyar dua puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
6. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2026 sebesar **Rp6.262.046.870.000,-** (*enam trilyun dua ratus enam puluh dua milyar empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (pagu definitif) Tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp644.066.870.000,-** (*enam ratus empat puluh empat milyar enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar **Rp5.617.980.000.000,-** (*lima trilyun enam ratus tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*).
7. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) tahun 2026 sebesar **Rp3.539.587.941.000,-** (*tiga trilyun lima ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (pagu definitif) Tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp3.452.283.939.000** (*tiga trilyun empat ratus lima puluh dua milyar dua ratus*

- delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);*
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu sebesar **Rp87.304.002.000** (*delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat juta dua ribu rupiah).*
8. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) tahun 2026 sebesar **Rp2.472.934.469.000,-** (*dua trilyun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),* untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (pagu definitif) Tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp2.430.276.632.000,-** (*dua trilyun empat ratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);*
 - b. Program Penyelenggaraan Pemilu sebesar **Rp42.657.837.000,-** (*empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).*
9. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh :
- g. Kementerian PANRB sebesar **Rp80.409.013.000,-** (*delapan puluh miliar empat ratus sembilan juta tiga belas ribu rupiah);*
 - h. BKN sebesar **Rp500.000.000.000,-** (*lima ratus miliar rupiah);*
 - i. LAN sebesar **Rp55.600.000.000,-** (*lima puluh lima miliar enam ratus juta rupiah);*
 - j. ANRI sebesar **Rp148.153.162.000,-** (*seratus empat puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);*
 - k. ORI sebesar **Rp199.348.354.000,-** (*seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);*
 - l. OIKN sebesar **Rp14.920.000.000.000,-** (*empat belas trilyun sembilan ratus dua puluh miliar rupiah);*
- Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2026 masing-masing kementerian/lembaga tersebut melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
10. Komisi II DPR RI menegaskan kepada seluruh mitra kerja untuk memperhatikan dengan seksama pandangan, saran, dan masukan

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI terkait implementasi anggaran tahun 2026.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.27 WIB.

JAKARTA, 15 SEPTEMBER 2025
KETUA RAPAT

TTD

ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP. M.Si.
A-325